

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TERHADAP TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN DAN ASAS HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan "tindak pidana" sebagai terjemahan dari "*Strafbaar Feit*" tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "tindak pidana" tersebut. Perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.²⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah "peristiwa pidana" pernah digunakan secara resmi. Secara substansif, pengertian dari istilah "peristiwa pidana" lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.³⁰

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu:

²⁹P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

³⁰Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi mengenai dilarang suatu dan diancamnya perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *weder recht telijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran yang kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebutoleh undang-undang. KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Keduadan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran.

Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.³¹

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Kedua jenis delik tersebut yaitu *Recht delicten* dan *Wetsdelicten*. *Recht delicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal pembunuhan dan pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”. Sedangkan *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana, misal memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, delik tersebut telah selesai dengan

³¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 44-45.

dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.³² Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri, tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidental (hal yang kebetulan).³³

Delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang), delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, dan jika belum maka paling banyak hanya ada percobaan.³⁴

c. Delik Sengaja dan Delik Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu ada kalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disama beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan

³²Ibid, hlm. 45.

³³Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.59.

³⁴Ibid, hlm. 45.

perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk *culpa*. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

d. Delik Commisionis dan Delik Omisionis

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil.

Dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*) ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

4. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat

nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338 disebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dalam ranah hukum pidana membicarakan nilai kemanusiaan merupakan pembicaran yang terkait dengan persoalan individualisasi pemidanaan. Individualisasi pemidanaan selalu berhubungan dengan 5 (lima) asas dalam ranah hukum pidana yaitu:

- a. Asas Personal/individual liability;
- b. Asas Fleksibilitas/Elastisitas;
- c. Asas Modifikasi;
- d. Asas Permaafan;
- e. Asas Culpabilitas/Kesalahan.

Berdasarkan 5 (lima) asas dalam ranah hukum pidana tersebut, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum pidana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan adalah penegakan hukum pidana terkait dengan

penerapan pasal-pasal dalam KUHPidana (WvS) yang mengandung pengaturan kelima asas tersebut.³⁵

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang. Perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, dengan kata lain merampas mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum, apabila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah:³⁶

"Pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan menghabisi, mencabut nyawa)"

³⁵ BATUBARA, Gialdah Tapiansari; SUSANTO, Anthon Freddy. ENFORCEMENT PATTERN OF CRIMINAL LAW BASED ON HUMANITY VALUES IN THE UTILITY PRINCIPAL PERSPECTIVE. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, [S.l.], v. 18, n. 1, mar. 2018. ISSN 2442-2274. Available at: <<http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/287>>. Date accessed: 18 aug. 2020. doi: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.287>. hlm. 52.

³⁶Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 257.

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain, pembunuhan (Belanda:*Doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda:*Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).³⁷

Bunyi Pasal 338 KUHP adalah:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"

Bunyi Pasal 340 KUHP adalah:

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"

Perkataan nyawa sering di sinonim dengan "jiwa" pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa dalam Pasal 338-340 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*Doodslag*).³⁸

³⁷Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni,Bandung, 2005, hlm. 129-130.

³⁸Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika,Jakarta 1999,hlm. 4.

2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP BAB XIX Pasal 338-350. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa kata jiwa mengandung beberapa arti. Antara lain, pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia.

Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/*murder*).

Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu:
 - 1) Kejahatan terhadap jiwa manusia;
 - 2) Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang baru lahir;
 - 3) Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.
- b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). *Dolus* menurut teori kehendak (*wilsiheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.³⁹

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Kejahatan itu meliputi:

- a. Dilakukan secara sengaja;
- b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;

³⁹Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Rajaratindo, Jakarta, 2001, hlm. 50.

- c. Dilakukan secara terencana;
- d. Keinginan dari yang dibunuh;
- e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Dalam hal menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, ada beberapa teori yaitu:

- a. Teori Aequivalensi yang dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori (*condition sin quanton*) yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat);
- b. Teori Adaequato yang dipegang oleh Van Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat);
- c. Teori Individualis dan Generalis dari T. Traget yaitu bahwa faktor dominan yang paling menentukan suatu akibat itulah yang menyebabkannya sementara menurut teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya harus dipisah satu-persatu.⁴⁰

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

- a. Atas dasar unsur kesalahannya

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam Pasal BAB XIX KUHP;

⁴⁰Ibid, hlm. 63-64.

- 2) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur BAB XIX;
- 3) Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, 351 ayat (3), dan lain-lain.

b. Atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP;
- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP;
- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam kejahatan terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata, senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum atau

tidak. Apabila karenanya (misalnya menikam) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (338 Jo. 53 KUHP), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP.⁴¹

Dan apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 macam, yakni:

- a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formal merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP);
- b. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif) misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP).

3. Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, Pasal 338 KUHP);
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP);
- c. Pembunuhan berencana (*moord*, Pasal 340 KUHP);

⁴¹Ibid, hlm. 55.

- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, 342, dan 343 KUHP);
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP);
- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP);
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 s/d 349 KUHP).⁴²

a. Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok

Kejahatan nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah:

"barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai "menghilangkan nyawa" orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konsitutif/*constitutief gevolg*). Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, apabila perbuatan itu tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang maka perbuatan itu merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 Jo. 53

⁴²Loc.cit.

KUHP), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP.⁴³

Ajaran Von Buri yang dikenal dengan teori *conditio sine qua non*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua faktor yang ada dianggap sama pentingnya dan karenanya dinilai sebagai penyebab dari timbulnya akibat. Oleh karena itu setiap faktor sama pentingnya, maka satu faktor tidak boleh dihilangkan dari rangkaian faktor penyebab, sebab apabila dihilangkan akibat itu tidak akan terjadi.⁴⁴

Perkembangan selanjutnya timbul banyak teori yang berusaha memperbaiki dan menyempurnakan teori Von Buri, yang pada dasarnya teori-teori tersebut mencari batasan antara mana faktor syarat dan mana faktor penyebab atas suatu akibat teori-teori ini dapat dikelompokkan kedalam dua teori besar, yakni:

- 1) Teori yang mengindividualisir (*individualisierende theorien*) atau teori yang membedakan;
- 2) Teori yang menggeneralisir (*generalisierende theorien*) atau teori yang menyamakan.

Teori yang mengindividualisir maksudnya ialah bahwa dalam menentukan faktor sebab, hanyalah melihat pada faktor mana yang paling berperan atau paling dominan (mempunyai andil paling besar terhadap timbulnya akibat, sedangkan faktor lain adalah faktor syarat.

⁴³Ibid, hlm. 57-58.

⁴⁴Ibid, hlm. 60.

Sedangkan teori yang menggeneralisir, maksudnya ialah dalam mencari untuk menentukan faktor sebab hanya melihat pada faktor mana yang pada umumnya menurut kewajaran dapat menimbulkan akibat.⁴⁵

Karena terdapat kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan ketidakpuasan bagi banyak ahli hukum terhadap teori yang mengindividualisir, maka timbulah teori yang menggeneralisir, teori ini pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Teori Adekuat Subyektif

Teori adekuat subyektif yang dipelopori oleh J. Von Kries, yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah *adequat* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor ini diketahui atau didasari oleh yang bersangkutan sebagai *adequat* untuk menimbulkan akibat itu.

2. Teori Adekuat Obyektif

Apabila teori *adequat* subyektif dari Von Kries dalam hal mencari faktor yang menurut kejadian yang normal yang didasari sebanding atau layak untuk menimbulkan akibat, yang artinya dengan melihat dari sudut subyektif, dan oleh karena itu pandangan Von Kries ini dinamakan *subjective prognose* (peramalan yang subjektif).⁴⁶

⁴⁵Ibid.hlm. 62.

⁴⁶Ibid, hlm. 62.

Lain halnya dengan teori adekuat obyektif yang dipelopori oleh Rumelin yang disebut dengan teori *obyektif nacbtraglicbe prognose* (peramalan yang obyektif). Menurut teori ini, dalam hal mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat pada faktor-faktor obyektif yang ada setelah (*post factum*) timbulnya akibat yang dapat dipikirkan secara obyektif dapat menimbulkan akibat. Bagaimana alam pikiran sikap batin yang bersangkutan sebelum berbuat tidaklah penting, melainkan bagaimana kenyataan obyektif setelah timbulnya akibat, apakah faktor atau perbuatan tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat itu.⁴⁷

b. Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Tindak Pidana Lain

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi:

"Pembunuhan yang diikuti. Disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain. Yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun."

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

⁴⁷Ibid, hlm. 63-64.

1. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif dalam Pasal 338 KUHP;
2. Yang diikat, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain;
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
 - b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
 - c. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu.⁴⁸

Kejahatan Pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat pada semua unsur yang disebabkan dalam butir 2 dan 3. Dalam dua butir itulah diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini.

Pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP) dan tindak pidana lain (selain pembunuhan). Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain ini ia belum terjadi misalnya membunuh untuk

⁴⁸Ibid, hlm. 79.

mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan Pasal 339 KUHP tidak terjadi.⁴⁹

Unsur subyektif “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku, yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Unsur obyektif “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doonpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).⁵⁰

⁴⁹Ibid, hlm. 79-80.

⁵⁰ Chidir Ali, Responsi Hukum Pidana : Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, Armico, Bandung, 1985, hlm. 9.

c. Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"

Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut *M.v.T* pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan, antara lain:

"dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya"⁵¹

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan "direncanakan lebih dahulu" antara lain sebagai:

"bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan untuk berfikir dengan tenang."⁵²

Sedangkan Chidir Ali menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang untuk memikirkan dengan tenang, Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang"⁵³

⁵¹Leden Marpaung, Op.cit, hlm. 31.

⁵²Ibid, hlm. 33.

⁵³Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 74.

Rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

1. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
2. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.⁵⁴

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (*kinder-doodslag*)

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama - lamanya tujuh tahun"

Unsur pokok dalam Pasal 341 KUHP tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*),

⁵⁴Leden Marpaung, Op.cit, hlm. 44.

yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.⁵⁵

Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak dibunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.

Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana (*kinder-moord*).

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Seorang ibu dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun"

Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan

⁵⁵Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 76.

hanya ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.⁵⁶

e. Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun"

Pasal 344 ini membicarakan mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaanya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344 KUHP, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344 KUHP, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa).

Contoh dari pelaksanaan Pasal 344 KUHP adalah jika dalam sebuah pendakian (*ekspedist*), dimana salah seorang anggotanya menderita sakit parah sehingga ia tidak ada harapan untuk meneruskan pendakian mencapai puncak gunung, sedangkan ia tidak suka

⁵⁶Loc.cit.

membebani kawan-kawannya dalam mencapai tujuan, di dalam hal ini mungkin ia minta dibunuh saja.⁵⁷

f. Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya, membunuh diri atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri"

Yang dilarang dalam Pasal tersebut adalah dengan sengaja menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain untuk bunuh diri dan kalau bunuh diri itu benar terjadi. Jadi seseorang dapat terlibat dalam persoalan itu dan kemudian dihukum karena kesalahannya, apabila orang lain menggerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri dan baru dapat dipidana kalau nyatanya orang yang digerakkan dan lain sebagainya itu membunuh diri dan mati karenanya.⁵⁸

Unsur "Jika pembunuhan diri terjadi" merupakan "*bijkomende voor-waarde van strafbaarheid*", yaitu syarat tambahan yang harus dipenuhi agar perbuatan yang terlarang dilarang tadi dapat dipidana.⁵⁹

⁵⁷Ibid, hlm. 77.

⁵⁸Loc.cit.

⁵⁹Loc.cit.

g. Pengguguran dan Pembunuhan Terhadap Kandungan

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata “*abortus provocatus*” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan: “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Jika diamati Pasal-Pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada tiga unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan, yaitu:

1. Janin;
2. Ibu yang mengandung;
3. Orang ketiga, yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.⁶⁰

Tujuan Pasal-Pasal tersebut adalah untuk melindungi janin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti “janin” sebagai 1). bakal bayi masih di kandungan; 2). embrio setelah melebihi umur dua bulan. Perkataan “gugur kandungan” tidak sama dengan “matinya janin”. Kemungkinan janin dalam kandungan dapat dibunuh, tanpa gugur. Namun pembuat undang-undang dalam rumusan KUHP, belum membedakan kedua hal tersebut.⁶¹

Pengaturan KUHP mengenai “pengguguran kandungan” hal ini diatur oleh Pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun"

⁶⁰Leden Marpaung, Op.cit, hlm. 46.

⁶¹Ibid, hlm. 47.

1. Pengguguran Kandungan oleh Orang Lain Tanpa Izin Perempuan yang Mengandung

Hal ini diatur dalam Pasal 347 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"(1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun"
 "(2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun"

2. Pengguguran Kandungan dengan Izin Perempuan yang Mengandungnya

Hal ini diatur oleh Pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"(1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan"
 "(2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun."

C. Asas-Asas Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai asas-asas, yang menunjukkan sifat-sifat tertentu, sifat-sifat mana tidak terdapat dalam macam-macam hukum lainnya, yakni:

1. Asas legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah

ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP);

2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan, artinya untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut;
3. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (Pasal 2 KUHP);
4. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimana pun ia berada (Pasal 5 KUHP);
5. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (Pasal 4 KUHP);
6. Asas *nebis in idem*, asas ini merupakan hal yang sangat esensi dalam penegakan hukum. Tujuannya agar penegakan hukum dilakukan secara berkeadilan sesuai karakteristik dan berdaya guna bagi masyarakat. Salah satu asas yang memberikan ketegasan kepastian hukum, keadilan menjamin perikemanusiaan dan wibawa putusan hakim yaitu asas *nebis in idem*. Asas

ini memberikan ketegasan bahwa seseorang tidak boleh diadili dan dihukum lebih dari satu kali atas kejahatan yang sama. Salah satu syaratnya adalah ada “perbuatan yang sama”. Menentukan ada tidaknya “perbuatan yang sama” merupakan masalah yang sukar (Pasal 76 KUHP).